

**SINKRONISASI NISAB ZAKAT PROFESI DALAM
REGULASI DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI
WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**

T E S I S

**OLEH
RIDUAN**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2024

**SINKRONISASI NISAB ZAKAT PROFESI DALAM
REGULASI DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI
WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**

Tesis

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh

Riduan

NIM. 200211040096

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riduan
NIM : 200211040096
Tempat Tanggal Lahir : Pagatan, 20 Desember 1973
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: **“SINKRONISASI NISAB ZAKAT PROFESI DALAM REGULASI DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN”**, adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan berlaku.

Demikian surat pernyataan ini, saya buat dengan sesungguhnya.

Batulicin, 23 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Riduan

PERSETUJUAN TESIS

**SINKRONISASI NISAB ZAKAT PROFESI DALAM
REGULASI DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI
WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

RIDUAN

NIM. 200211040096

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

Pembimbing II



Dr. Badi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I





PENGESAHAN TESIS
SINKRONISASI NISAB ZAKAT PROFESI DALAM
REGULASI DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI
WILAYAH KALIMANTAN SELATAN

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:

RIDUAN

NIM. 200211040096

Telah Diajukan pada Dewan Penguji
Pada: Hari **Senin**, Tanggal **22 Juli 2024**
Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Wahyudin, M.Pd.I (Ketua/Penguji 1)	1. 
2. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (Penguji 2)	2. 
3. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I. (Penguji 3)	3. 
4. Dr. Ilham Akbar, S.H., M.Kn (Penguji 4)	4. 



Mengetahui,
Direktur Pascasarjana


Prof. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd.,
NIP. 19710525 199703 1 006

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا، والصلاة والسلام على رسول الله، المبعوث رحمة للعالمين، الذي أدى الأمانة، وبلغ الرسالة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على بيضاء نقية، ليلها كنهارها لا يزيغُ عنها إلا هالك. وبعد:

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt., karena hanya dengan karunia nikmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Demikian juga shalawat juga salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw., serta para sahabat dan pewaris risalahnya.

Penelitian ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Tentu tidak mengurangi rasa hormat saya tidak semua saya sebutkan dalam kata pengantar ini. Berkat rahmat Allah swt., saya telah menyelesaikan tesis yang berjudul: **SINKRONISASI NISAB ZAKAT PROFESI DALAM REGULASI DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN.**

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., sebagai Pembimbing I dan Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I., sebagai Pembimbing II, yang telah banyak berkenan menerima saya dengan baik untuk berdiskusi tentang tema-tema pokok dalam Tesis ini. Komentar-komentar beliau yang kritis terhadap isi dari tesis penulis membuat penulis semakin terdorong untuk meningkatkan kualitas analisis dalam tesis ini. *Lâ syukran li al-*

wajib, mereka berdua pantas untuk mendapatkan rasa terima kasih yang terdalam atas apa yang telah mereka lakukan dan berikan kepada saya bahkan pemberian yang melampaui batas kewajiban mereka. Setiap waktu, melalui saluran telekomunikasi, mereka bersedia menerima permintaan bimbingan. Mereka telah menginspirasi saya dan tidak kenal lelah dalam berdiskusi tentang isi dan arah tesis saya ini agar nantinya tidak hanya menjadi sebuah kewajiban akademik namun dapat dimanfaatkan di dunia praktis.

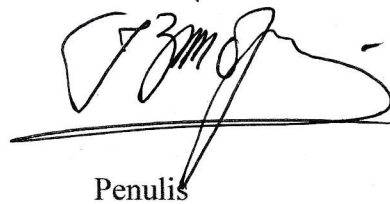
Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada Dr. Ilham Akbar, S.H., M.Kn., sebagai Ketua Program Studi (Prodi) S2 Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Antasari dan juga Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy., sebagai Sekretaris Program Studi (Prodi) S2 Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Antasari yang telah memberikan semangat kepada kami para mahasiswa untuk segera menyelesaikan studinya.

Terima kasih yang paling utama, penulis sampaikan kepada istri saya, Hj. Mursidah, S.Ag, dan anak-anak kami yang telah dengan sabar merelakan penulis meminta waktu kebersamaan, bersama mereka dengan menggunakannya untuk mengerjakan tesis ini. Penulis sangat beruntung memiliki keluarga yang mendukung penulis untuk menyelesaikan puncak studi akademik ini.

Semoga segala amal yang telah diperbuat akan menjadi amal saleh, yang akan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah swt., kelak di kemudian hari. Dan bila ada kebenaran dan kemanfaatan dalam tesis ini dikarenakan pertolongan Allah swt., dan ulama-ulama dan para cendekiawan lewat literatur yang penulis gunakan dan bila ada kesalahan itu semata-mata karena kejahilan dan keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis sendiri. Maksud hati ingin memberikan yang terbaik,

namun keterbatasan kemampuanlah yang menyebabkan kualitas tulisan ini masih jauh di bawah harapan. Untuk itu, penulis mohon maklum dan maaf atas segala kekurangan, baik di dalam segi kuantitas maupun kualitas tulisan. Saran dan kritik demi kemanfaatan bersama selalu penulis harapkan. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat. *Amin ya rabb al'âlamîn.*

Batulicin, 26 Juni 2024



Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
مستخلص البحث	xiv
BAB I PENDAHULUAN	xv
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	8
1. Secara Teoritis	8
2. Secara Praktis	9
E. Definisi Istilah	9
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Kerangka Teori.....	18
H. Metode Penulisan.....	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Sifat Penelitian	26
4. Bahan Hukum	27
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	28
6. Analisis Data	28
I. Sistematika Penulisan	29
BAB II ZAKAT PROFESI DALAM KAJIAN AKADEMIK DAN REGULASI ZAKAT	31
A. Pengertian Zakat	31
B. Kaidah Metodologis Penetapan Zakat Profesi	34
C. Perdebatan Akademik Tentang Zakat Profesi	52

D. Zakat Profesi Dalam Undang-Undang.....	59
BAB III ZAKAT PROFESI DALAM REGULASI ZAKAT DI KALIMANTAN SELATAN (STUDI KRITIS PERHITUNGAN DAN NISAB)	73
A. Zakat Profesi Pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005	73
B. Zakat Profesi Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2010.....	75
C. Zakat Profesi Pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2014.....	78
D. Zakat Profesi Pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2015	81
E. Zakat Profesi Pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017.....	94
F. Zakat Profesi Pada Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2024.....	100
BAB IV NISAB ZAKAT PROFESI PADA REGULASI DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN DALAM KAJIAN	105
A. Konsep Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Dalam Pembentukan Regulasi Zakat Pada Peraturan Daerah di Kalimantan Selatan	105
B. Analisis Sinkronisasi Materi Zakat Profesi Antar Peraturan Daerah dan Peraturan di Atasnya	114
C. Standardisasi Nisab Zakat Profesi Dalam Upaya Harmonisasi Materi Zakat Profesi di Kalimantan Selatan	139
BAB V PENUTUP	166
A. Simpulan.....	166
B. Saran	168

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA
(Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Antasari Tahun 2021)

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	h	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	z	ه	h
د	d	ع	‘	ء	‘
ذ	dz	غ	gh	ي	y
ر	r	ف	f		-

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal Tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	a	Fathah
ِ	i	Kasrah
ُ	u	Dhammah

Kata sandang: contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الديوان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ	ai	a dan i
وَ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ْ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbuthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طريقة	tharîqah
2	الجامعة الإسلامية	Al-Jamî'ah al-Islâmiyyah
3	وحدة الوجود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذهب الاستاذ	Dzahaba al-ustâdzu
ثبت الاجر	Tsabata al-ajru
الحركة العصرية	Al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyah
اشهد ان لا اله الا الله	Asyahadu an lâ ilâha illa Allâh
مولانا ملك الصالح	Mawlânâ Malik al-Shâlih
يؤثركم الله	Yu’tsirukum Allâh
المظاهر العقلية	Al-Mazhâhir al-‘Aqliyah
حب الاستطلاع	Hub al-istithlâ’
المادة المصنوعة من الحيوان	Al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طرف العين	Tharf al-‘ayni
المساهمة	Al-musâhamah
من سلك طريقا	Man salaka tharîqan

ABSTRAK

Riduan, NIM. 200211040096, *Sinkronisasi Hukum Zakat Profesi Dalam Regulasi Daerah Tentang Pengelolaan Zakat Di Wilayah Kalimantan Selatan*. Pembimbing I: Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, Pembimbing II: Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I., pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: *Sinkronisasi, Zakat Profesi, Peraturan Daerah*

Zakat profesi merupakan salah satu objek zakat yang diatur oleh regulasi zakat, termasuk peraturan daerah. Dalam kenyataannya realisasi zakat profesi sering kali ditafsirkan berbeda oleh banyak pihak termasuk tokoh agama dan lainnya. Di Kalimantan Selatan setidaknya ada 6 peraturan daerah yang mengatur tentang zakat. Dari laporan Baznas daerah kabupaten tersebut, disampaikan bahwa realisasi zakat profesi sangat rendah. Tentu menjadi pertanyaan apakah ada perbedaan antara keenam peraturan daerah tersebut dalam mengatur zakat profesi yang menjadi penyebab tidak optimalnya pendapatan zakat profesi. Selanjutnya menjadi rumusan masalahnya adalah tentang bagaimana sinkronisasi nisab zakat profesi pada materi keenam peraturan daerah tersebut dikaji dengan teori sistem hukum dan hierarki hukum.

Penelitian ini adalah penelitian normative, yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan menggunakan teori pembaruan hukum Islam teori sistem hukum dan teori hierarki hukum sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan daerah tentang zakat profesi tidak diatur secara spesifik, dan memiliki perbedaan epistemologis antar peraturan daerah tersebut. Peraturan Daerah Tapin Nomor 13 Tahun 2010 sampai saat ini tidak diperbarui dan masih berlaku meskipun UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah berlaku. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2015 memberikan pedoman bahwa nisab zakat profesi berupa pendapatan, gaji, honorarium dan sejenisnya, adalah 91,92 gram. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tidak mengatur nisab tersebut secara jelas. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 tahun 2005 tidak mengategorikan hasil pendapatan dan jasa sebagai objek zakat, namun menggolongkannya ke dalam golongan infaq. Perda Balangan Nomor 4 Tahun 2024 memberikan pilihan nisab zakat profesi, yaitu senilai 85 gram emas atau 653 kg gabah atau 524 kg beras. Menurut teori pembaruan hukum Islam, terjadi pembaruan terhadap fikih yang dijadikan perundang-undangan adalah hal yang tidak bisa dipungkiri dan menjadi bagian penting dari konsekuensi positivisasi hukum Islam. Namun dari kajian substansi hukum yang memiliki ketidakharmonisan antara hukum di bawah dan hukum yang lebih tinggi, menjadikan budaya hukum di masyarakat menjadi terganggu dan berimbas kepada optimalisasi pendapatan zakat termasuk zakat profesi.

ABSTRACT

Riduan, NIM. 200211040096, *Sincronization of Professional Zakat Law in Regional Regulations on Zakat Management in the South Kalimantan Region*. Supervisor I: Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, Supervisor II: Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I., at the Sharia Economic Law Study Program, Postgraduate of Antasari State Islamic University Banjarmasin, 2024.

Keywords: *Sincronization, Professional Zakat, Regional Regulations*

Professional zakat is one of the objects of zakat regulated by zakat regulations, including regional regulations. In reality, the realization of professional zakat is often interpreted differently by many parties, including religious leaders and others. In South Kalimantan, there are at least six regional regulations that regulate zakat. From the report of the district Baznas, it was conveyed that the realization of professional zakat was very low. Of course, it is a question of whether there is a difference between the six regional regulations for regulating professional zakat, which is the cause of the non-optimal income of professional zakat. Furthermore, the formulation of the problem is about how the synchronization of professional zakat nisab in the sixth material of the regional regulation is studied with the theory of the legal system and legal hierarchy.

This research is normative research, which is carried out by analyzing literature materials using a legislative approach, a conceptual approach, and Islamic legal reform theory, legal system theory, and legal hierarchy theory as an analytical knife.

The results of this study show that regional regulations on professional zakat are not specifically regulated and have epistemological differences between the regional regulations. Tapin Regional Regulation Number 13 of 2010 has not been updated until now and is still valid even though Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management has come into effect. Banjarmasin Mayor Regulation Number 1 of 2014 and South Hulu Sungai Regency Regional Regulation Number 17 of 2015 provide guidelines that professional zakat nisab in the form of income, salary, honorarium, and the like is 91.92 grams. Banjar Regency Regional Regulation Number 8 of 2017 does not clearly regulate the nisab. The Regional Regulation of North Hulu Sungai Regency Number 19 of 2005 does not categorize the proceeds of income and services as objects of zakat but classifies them into the infaq group. Balangan Regional Regulation Number 4 of 2024 provides a choice of professional zakat nisab, which is worth 85 grams of gold, 653 kg of grain, or 524 kg of rice. According to the theory of Islamic law reform, an update to the fiqh that is made into law is undeniable and an important part of the consequences of the positivization of Islamic law. However, from the study of legal substances that have a disharmony between the lower law and the higher law, the legal culture in the community is disturbed and has an impact on the optimization of zakat income, including professional zakat.

مستخلص البحث

رضوان، رقم الطالب. 200211040096 توحيد قانون الزكاة المهنية في اللوائح الإقليمية لإدارة الزكاة في منطقة كاليمانتان الجنوبية. المشرف الأول: الأستاذ الدكتور جلال الدين الماجستير، المشرف الثاني: الدكتور بودي رحمت حكيم، الماجستير، الدراسات العليا في جامعة أنتاساري الإسلامية الحكومية بنجارماسين، 2024.

الكلمات المفتاحية: التوحيد، الزكاة المهنية، اللوائح الإقليمية

الزكاة المهنية هي أحد أهداف الزكاة التي تنظمها لوائح الزكاة، بما في ذلك اللوائح الإقليمية. في الواقع، غالبا ما يتم تفسير تحقيق الزكاة المهنية بشكل مختلف من قبل العديد من الأطراف، بما في ذلك الزعماء الدينيين وغيرهم. في جنوب كاليمانتان، هناك ما لا يقل عن 6 لوائح إقليمية تنظم الزكاة. من تقرير منطقة بازناس، تم نقل أن تحقيق الزكاة المهنية كان منخفضا للغاية. بالطبع، إنها مسألة ما إذا كان هناك اختلاف بين اللوائح الإقليمية الستة في تنظيم الزكاة المهنية والتي هي سبب الدخل غير الأمثل للزكاة المهنية. علاوة على ذلك، فإن صياغة المشكلة تدور حول كيفية دراسة تزامن نزاعات الزكاة المهنية في المادة السادسة من اللائحة الإقليمية مع نظرية النظام القانوني والتسلسل الهرمي القانوني.

هذا البحث هو بحث معياري، يتم إجراؤه من خلال تحليل المواد الأدبية باستخدام منهج تشريعي، ونهج مفاهيمي، واستخدام نظرية الإصلاح القانوني الإسلامي، ونظرية النظام القانوني، ونظرية التسلسل الهرمي القانوني كسكين تحليلي.

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن اللوائح الإقليمية الخاصة بالزكاة المهنية ليست منظمة على وجه التحديد، ولها اختلافات معرفية بين اللوائح الإقليمية. لم يتم تحديث اللائحة الإقليمية رقم 13 لعام 2010 حتى الآن ولا تزال سارية المفعول على الرغم من دخول القانون رقم 23 لعام 2011 بشأن إدارة الزكاة حيز التنفيذ. تنص لائحة عمدة بانجارماسين رقم 1 لعام 2014، اللائحة الإقليمية لجنوب هولو سونغاي ريجنسي رقم 17 لعام 2015 على إرشادات تفيد بأن نصاب الزكاة المهنية في شكل دخل وراتب وأتعاب وما شابه ذلك، هي 91.92 جراما. لا تنظم اللائحة الإقليمية لبنجر ريجنسي رقم 8 لعام 2017 النصاب بشكل واضح. لا تصنف اللائحة الإقليمية لشمال هولو سونغاي ريجنسي رقم 19 لعام 2005 عائدات الدخل والخدمات ك أشياء للزكاة، ولكنها تصنفها في مجموعة إنفاق. توفر اللائحة الإقليمية لبانغان رقم 4 لعام 2024 خيارا من نصاب الزكاة المهنية، والتي تبلغ قيمتها 85 جراما من الذهب أو 653 كجم من الحبوب أو 524 كجم من الأرز. وفقا لنظرية إصلاح الشريعة الإسلامية، هناك تحديث للفقهاء الذي يتم تحويله إلى قانون لا يمكن إنكاره وجزء مهم من عواقب وضع الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، من دراسة الجوهر القانوني الذي يحتوي على تناقض بين القانون الأدنى والقانون الأعلى، فإن الثقافة القانونية في المجتمع مضطربة ولها تأثير على تحسين دخل الزكاة، بما في ذلك الزكاة المهنية.